

**EVALUASI ATAS SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG PADA  
SPP UPK PNPM MANDIRI PEDESAAN KECAMATAN  
BARAKA KABUPATEN ENREKANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**IHDIL**

**105730481214**



**JURUSAN AKUTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**EVALUASI ATAS SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG PADA  
SPP UPK PNPM MANDIRI PEDESAAN KECAMATAN  
BARAKA KABUPATEN ENREKANG**

**Laporan Tugas Akhir Ini**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat**

**Sarjana Ekonomi**



**Oleh**

**IHDIL**

**105730481214**

**JURUSAN AKUTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk ayah ibunda tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu dalam mendo'akan aku, atas segala kesabaran dan pengorbanan yang mengantarkan aku sampai kini. Tak pernah terbalaskan cinta dan kasih sayang ayah bunda.

### **MOTTO**

*Kalau Orang tua-mu pernah gagal!*

*Kamu jangan!!*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Evaluasi atas Sistem Pengendalian Piutang pada SPP  
UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Baraka  
Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : IHDIL

No. Stambuk/NIM : 105730481214

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 25 Mei 2019 di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 19 Juni 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

**Amril, S.E., M.Si., Ak. CA**  
NIDN: 0020087606

Pembimbing II,

**Mukminatid Ridwan, SE., M.Si**  
NIDN: 0919017901

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi,

**Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

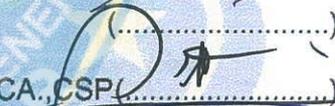
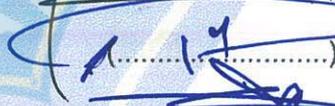
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **IHDIL, NIM : 105730481214**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 159/2019 Tahun 1440 H/2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Syawal 1440 H  
19 Juni 2019 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Abdul Rahman Rahim, S.E.,MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E., MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, S.E., MM (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
  1. Dr. Agus Salim HR, S.E., MM 
  2. Ismail Badollahi, S.E.,M.Si.,Ak.CA.,CSP 
  3. Faidul Adzim, SE.,M.Si 
  4. Samsul Risal, S.E.,MM 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong, S.E.,M.M**  
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IHDIL  
Stambuk : 105730481214  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : Evaluasi atas Sistem Pengendalian Piutang pada SPP  
UPK PNPM mandiri Pedesaan Kecamatan Baraka  
Kabupaten Enrekang

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 19 Juni 2019



pernyataan,

**Ihdil**

Diketahui Oleh:



**Ismail Rasulong, S.E.,M.M**  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi,

**Ismail Badollahi, S.E.,M.Si,Ak.,CA**  
NBM: 107 3428

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Dimana penulis mengambil judul “Evaluasi atas Sistem Pengendalian Piutang terhadap SPP UPK PNPM Mandiri Pedesaan Baraka Kabupaten Enrekang” Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh program studi S1 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini pembahasan yang di sajikan merupakan hasil usaha yang maksimal dari penulis. Namun penulis menyadari sepenuhnya laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun yang dapat memberikan manfaat dan kemajuan bagi peningkatan penulis dalam penulisan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dorongan dan pengarahan kepada penulis. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE., MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Amril, SE., M.Si., Ak.CA selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memberi masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Mukminati Ridwan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberi masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Hadirman, S.I.P selaku ketua UPK PNPM MPd Baraka kabupaten Enrekang yang telah memberi kesempatan untuk meneliti di tempat beliau memimpin.
7. Ibunda dan Ayah tersayang, yang memberikan dukungan baik dalam bentuk moril, materil serta do'a yang tiada hentinya.

Semoga Allah SWT. melimpahkan kepada mereka berkah dan karunia-Nya atas segala perhatian dan bantuan yang di berikan.

Makassar. April 2019

Penulis

Ihdil

## ABSTRAK

**Ihdil. 2019** Evaluasi atas Sistem Pengendalian Piutang Terhadap SPP UPK PNPM Mandiri Pedesaan Baraka Kabupaten Enrekang, Skripsi. Dibimbing oleh Amril dan Mukminati Ridwan. Program studi Akuntansi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini dilakukan pada UPK PNPM MPd Baraka kabupaten Enrekang, dengan tujuan untuk mengetahui peran dari sistem pengendalian piutang untuk meminimalkan piutang tak tertagih pada Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian yang dilakukan pada UPK PNPM MPd Baraka Kabupaten Enrekang adalah sistem pengendalian yang baik dapat dilihat dari pemberian kredit, penagihan, dan penetapan dan penyelenggaraan pengendalian yang layak. Sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah tanggung renteng, dan sanksi lokal. Sistem pengendalian tersebut berperan penting dalam meminimalkan piutang tak tertagih dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

**Kata Kunci:** Pengendalian Piutang, SPP, Piutang Tak Tertagih.

## **ABSTRACT**

**IHDIL.** 2019 *Evaluation of the Receivables Control System for the SPP UPK PNPM Mandiri Pedesaan Baraka Enrekang Regency, Thesis. Guided by Amril and Mukminati Ridwan. Accounting study program, Department of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar.*

*This research was conducted at the UPK PNPM MPD Baraka in Enrekang district, with the aim of knowing the role of the receivables control system to minimize bad debts at the Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan in Baraka District, Enrekang regency.*

*The results of the research conducted at the UPK PNPM MPD in Baraka Enrekang Regency are good control systems that can be seen from the provision of credit, collection, and the determination and implementation of appropriate controls. The debt control system implemented by the UPK of Baraka District in Enrekang Regency is joint responsibility, and local sanctions. The control system plays an important role in minimizing bad debts in the Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan in Baraka District, Enrekang Regency.*

**Keywords:** *Receivables Control, SPP, Bad Debts.*

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6

1. Bagi Peneliti .....	6
2. Bagi Perusahaan .....	6
3. Bagi Umum .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Teori .....	8
1. Sistem .....	8
2. Pengendalian intern .....	13
3. Piutang .....	21
4. Sistem Pengendalian Piutang .....	22
5. Piutang Tak Tertagih .....	23
6. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) .....	25
B. Tinjauan Empiris .....	25
C. Kerangka Konsep .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	31
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisa Data .....	34
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	35
B. Hasil Penelitian .....	37

C. Pembahasan.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Simpulan .....	57
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris .....	27
Tabel 4.1 Perkembangan saldo pinjaman UPK .....	53
Tabel 4.2 Data Penggolongan Kolektibilitas Unit Pengelola Kegiatan.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....30

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan UPK.....37



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan suatu persoalan yang tidak mampu dibenahi dengan baik, ini karena efek dari pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, kurang mempunyai pengelolaan sumber daya alam, kreatifitas masyarakat yang tidak mendapatkan tempat maksimal untuk dikembangkan serta banyak hal lain yang selayaknya harus menjadi fokus pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan negeri ini.

Penanggulangan kemiskinan merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah dan organisasi sipil (LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Organisasi Kegamaan, dan masyarakat miskin).

Salah satu bentuk pemberdayaan kemiskinan berupa kebijakan bantuan sosial yang sangat strategis dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan fasilitas pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong percepatan pembangunan di daerah.

Program pemberdayaan masyarakat didorong melalui strategi yang lebih realistis kepada target sasaran yaitu dengan diberlakukannya Inpres Desa Tertinggal (IDT) mengenai peningkatan penanggulangan kemiskinan, kemudian diikuti dengan program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), serta dipertajam dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada Tahun Anggaran 1998/1999.

Pada masa krisis ekonomi Tahun 1998, program pemberdayaan masyarakat semakin digalakkan, yaitu dengan diluncurkannya kegiatan pemberdayaan melalui Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Namun hasilnya belum seluruh program pemberdayaan masyarakat tersebut berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Salah satu program nasional yang keberadaannya benar-benar membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi terutama perekonomian mikro adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau paket PNPM Mandiri merupakan salah satu implementasi prioritas nasional penanggulangan dan pencapaian target-target MDGs. Program PNPM Mandiri telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-5 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007, di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan keberlanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan yang dinilai selama ini berhasil. PNPM Mandiri Perdesaan didanai oleh Bantuan Langsung Masyarakat dengan salah satu kegiatan yaitu program simpan pinjam perempuan. Dengan suku bunga yang lebih rendah setiap bulan tanpa syarat agunan, dibandingkan dengan Bank yang mencapai 2% atau lebih setiap bulannya dan memiliki syarat agunan, diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengembangkan usaha mereka.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah Unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, yang mana UPK merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari PNPM Mandiri Perdesaan karena UPK sendiri terbentuk oleh adanya Program PNPM-MPd Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, merupakan unit pengelola dana bergulir dari pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan jasa simpan pinjam kepada masyarakat sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari PNPM Mandiri tersebut.

Kegiatan usaha Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini memiliki visi sebagai tujuan utamanya. Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen harus mengelolah perusahaannya dengan baik dan harus didukung oleh penetapan perencanaan, kebijakan, prosedur, pendelegasian wewenang, metode-metode dan standar pelaksanaan yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi hasil yang dicapai.

Perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan dagang maupun jasa tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan adanya piutang. Baik piutang karena kegiatan dagang (perusahaan dagang) maupun karena jasa semisal memberikan pinjaman kredit. Salah satu contoh, pemberian kredit oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang menimbulkan piutang.

Artinya, dibawah Unit Pengelola Kegiatan (UPK), kelompok SPP merupakan kelompok penerima modal pinjaman dari UPK. Kelompok SPP ini terdiri dari masyarakat miskin produktif yang bertujuan untuk membangkitkan jiwa *entrepreneurship* para perempuan khususnya para Ibu rumah tangga sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarganya dan juga kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Salah satu contoh dari pelaksanaan

SPP oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan yaitu di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan yang masih berjalan sampai sekarang.

Sebagaimana dalam pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada PNPM Mandiri ini tidak 100% berjalan lancar. Salah satu masalah dalam program ini adalah piutang oleh perusahaan yang susah atau bahkan tidak bisa ditagih pada kelompok SPP. Kelompok SPP tidak semuanya dapat mengembalikan kepada perusahaan (PNPM) sebagian dari hutangnya sampai waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Piutang tak tertagih adalah piutang kepada kelompok SPP yang tidak bisa dibayar atau dilunasi oleh kelompok SPP terhadap Lembaga PNPM sampai waktu yang telah di sepakati sebelumnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan piutang suatu perusahaan tidak tertagih, baik dari segi pemilik piutang maupun dari segi pihak yang berutang. Salah satu penyebab tidak tertagihnya suatu piutang usaha dari segi pemilik piutang usaha adalah karena kurangnya usaha penagihan, kurangnya kontrol dari pemberi piutang, kurangnya seleksi dalam pemberian kredit, sedangkan dari segi pihak yang berutang penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya pihak yang berutang tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan, kebangkrutan usaha dll.

Piutang tak tertagih yang dimiliki oleh PNPM Mandiri Pedesaan tidak selayaknya dibiarkan begitu saja. Perlu adanya tanggapan dari PNPM itu sendiri semisal pengendalian intern terhadap piutang sehingga risiko piutang tak tertagih dapat berkurang. Sistem pengendalian piutang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengendalikan semua piutang perusahaan.

Pengendalian piutang sebenarnya dimulai sebelum adanya pemberian kredit pinjaman, sampai setelah penagihan. Prosedur pengendalian penerimaan kas di satu pihak dan pengendalian persediaan di lain pihak. Piutang merupakan mata rantai di antara keduanya.

Berdasarkan uraian di atas, dan dengan melihat sifat atas usaha dari objek penelitian Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang berlokasi di Baraka, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui peran dari sistem pengendalian piutang untuk meminimalkan piutang tak tertagih pada Unit Pengelola (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Beranjak dari permasalahan diatas menarik bagi peneliti untuk melihat lebih detail bagaimana sebenarnya tata kelola piutang yang dilakukan oleh UPK PNPM-MPd Baraka kabupaten Enrekang dalam hal pengendalian piutang yang telah mereka lakukan, atas dasar tersebut maka peneliti mengangkat sistem pengendalian piutang sebagai objek yang akan diteliti dengan judul **“Evaluasi Atas Sistem Pengendalian Piutang pada SPP UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana sistem pengendalian piutang untuk meminimalkan piutang tak tertagih pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui peran dari sistem pengendalian piutang untuk meminimalkan piutang tak tertagih pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga dalam merumuskan, menganalisa, memecahkan masalah dengan menerapkan ilmu yang telah didapat selama belajar di perguruan tinggi.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pikiran berupa pembahasan dan saran untuk perusahaan serta dapat menambah informasi dalam menerapkan sistem pengendalian piutang guna meminimalkan resiko piutang yang tak tertagih.

#### **3. Bagi Umum**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan dapat dijadikan bahan kajian sebagai sumber informasi

mengenai masalah penerapan sistem pengendalian piutang dalam meminimalkan resiko piutang tak tertagih.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Sistem

###### a. Pengertian Sistem

Pada dasarnya sistem merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh guna untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama yang dihasilkan oleh proses tertentu.

Defenisi sistem menurut Susanto (2013:22) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

“Sistem adalah kumpulan/grup dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”

Sedangkan menurut Sutarman (2009:5) dalam bukunya Pengantar Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

“Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.”

Pengertian sistem perlu dibedakan antara pengertian sistem dan prosedur, agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai sistem yang menghasilkan output yang diolah dalam sistem informasi.

Adapun defenisi dari sistem dan prosedur yaitu, “Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan, sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang

dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.” (Mulyadi, 2010: 5)

Dari beberapa definisi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan bagian-bagian atau sub sistem-sub sistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prosedur adalah suatu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tahap tertentu dalam hubungan pencapaian tujuan akhir.

#### **b. Karakteristik Sistem**

Menurut Mulyanto (2009:2) dalam bukunya Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi:

##### **1) Mempunyai Komponen Sistem (*Components Sistem*)**

Suatu sistem tidak berada dalam lingkungan yang kosong, tetapi sebuah sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan yang berisi sistem lainnya. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. Apabila suatu sistem merupakan salah satu dari komponen sistem lain yang lebih besar, maka akan disebut dengan *subsistem*, sedangkan sistem yang lebih besar tersebut adalah lingkungannya.

##### **2) Mempunyai Batasan Sistem (*Boundary*)**

Batas sistem merupakan pembatas atau pemisah antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

### 3) Mempunyai Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan luar adalah apa pun di luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem, baik pengaruh yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Pengaruh yang menguntungkan ini tentunya harus dijaga sehingga akan mendukung kelangsungan operasi sebuah sistem. Sedangkan lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan sebuah sistem.

### 4) Mempunyai Penghubung (*interface*) Antar Komponen

Penghubung (*interface*) merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Penghubung inilah yang akan menjadi media yang digunakan data dari masukan (*input*) hingga keluaran (*output*). Dengan adanya penghubung, suatu subsistem dapat berinteraksi dan berintegrasi dengan subsistem yang lain membentuk satu kesatuan.

### 5) Mempunyai Masukan (*input*)

Masukan atau input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*), yaitu bahan yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat beroperasi dan masukan sinyal (*signal input*), yaitu masukan yang diproses untuk mendapatkan keluaran.

### 6) Mempunyai Pengolahan (*processing*)

Pengolahan (*process*) merupakan bagian yang melakukan perubahan dari masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan.

7) Mempunyai Sasaran (*Objective*) dan Tujuan

Suatu sistem pasti memiliki sasaran (*objective*) atau tujuan (*goal*). Apabila sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Tujuan inilah yang mengarahkan suatu sistem. Tanpa adanya tujuan, sistem menjadi tidak terarah dan terkendali.

8) Mempunyai Keluaran (*output*)

Keluaran (*output*) merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran dapat berupa informasi sebagai masukan pada sistem lain atau hanya sebagai sisa pembuangan.

9) Mempunyai Umpan Balik (*Feed Back*)

Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali (*Control*) sistem untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal.

**c. Klasifikasi Sistem**

Menurut Mulyanto (2009:8) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Sistem dapat di klasifikasikan berbagai sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Sistem abstrak (*abstract system*) dan sistem fisik (*physical system*).

Sistem abstrak (*abstract system*) adalah sistem yang berupa pemikiran atau gagasan yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik (*physical system*) adalah sistem yang ada secara fisik dan dapat dilihat dengan mata.

- 2) Sistem alamiah (*natural system*) dan sistem buatan manusia (*human made system*).

Sistem alamiah adalah sistem yang keberadaannya terjadi karena proses alam, bukan buatan manusia. Sedangkan sistem buatan manusia (*human made systems*) adalah sistem yang terjadi melalui rancangan atau campur tangan manusia.

- 3) Sistem tertentu (*deterministic system*) dan sistem tak tentu (*probabilistic system*).

Sistem tertentu (*deterministic systems*) yaitu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara cepat dan interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti. Sedangkan sistem tidak tentu (*probabilistic systems*) yaitu sistem yang hasilnya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.

- 4) Sistem tertutup (*closed system*) dan sistem terbuka (*open system*).

Sistem tertutup (*closed systems*) yaitu sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan di luar sistem. Sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sistem ini juga bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Dalam kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah sistem yang relatif tertutup (*relative closed system*). Sistem relatif tertutup biasanya mempunyai masukan dan keluaran yang tertentu serta tidak terpengaruh oleh keadaan di luar sistem. Sedangkan sistem terbuka (*open system*) adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan luar dan dapat terpengaruh dengan keadaan lingkungan luar. Sistem terbuka menerima *input* dari

subsistem lain dan menghasilkan *output* untuk subsistem lain. Sistem ini mampu beradaptasi dan memiliki sistem pengendalian yang baik karena lingkungan luar yang bersifat merugikan dapat mengganggu jalannya proses di dalam sistem.

#### d. Tujuan Sistem

Adapun tujuan sistem menurut Susanto (2013:23) yang bukunya berjudul Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut :

“Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau kriteria dari sasaran tersebut kemungkinan besar sasaran tersebut tidak akan pernah tercapai. Ciri-ciri atau kriteria dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai suatu keberhasilan suatu sistem dan menjadi dasar dilakukannya suatu pengendalian.”

## 2. Pengendalian intern

### a. Pengertian Pengendalian *Intern*

Syukur (2009:95) mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah tindakan preventif atas keselamatan piutang dagang usaha dari adanya kemungkinan piutang tak tertagih, keterlambatan penagih dan penyalahgunaan .”

*Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI)* mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut, sebagaimana terdapat dalam buku Auditing buku 1 edisi 4 karangan Agoes (2016:100):

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas-yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- Keadaan pelaporan keuangan,
- Efektifitas dan efisiensi operasi, dan
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat simpulkan bahwa pengendalian *intern* adalah rencana, metode, prosedur dan kebijakan yang didesain untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

#### **b. Tujuan Pengendalian *Intern***

Mulyadi (2010:178) mengemukakan bahwa tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kekayaan perusahaan.
  - a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan :
    - 1) Pembatasan akses langsung terhadap kekayaan.
    - 2) Pembatasan akses tidak langsung terhadap kekayaan.
  - b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya, meliputi:
    - 1) Perbandingan secara periodik antara catatan akuntansi dengan kekayaan yang sesungguhnya ada.
    - 2) Rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
  - a. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan :
    - 1) Pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
    - 2) Pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
  - b. Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam catatan akuntansi perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pencatatan semua transaksi yang terjadi.
  - 2) Transaksi yang dicatat adalah benar – benar terjadi.
  - 3) Transaksi dicatat dalam jumlah yang benar.
  - 4) Transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya.
  - 5) Transaksi dicatat dengan penggolongan yang seharusnya.
  - 6) Transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti.
3. Mendorong efisiensi
  4. Mendorong di patuhinya kebijaksanaan manajemen

### c. Komponen-komponen Pengendalian *Intern*

Komponen-komponen yang terdapat didalam Pengendalian *Intern* menurut Agoes (2016:100) adalah *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian), *Risk Assessment* (Penaksiran Resiko), *Control Activities* (Aktivitas Pengendalian), *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi), *Monitoring* (Pemantauan).

Komponen-komponen tersebut merupakan proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengendalian *intern*. Lima komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian *intern* yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Ada beberapa komponen dalam pengendalian lingkungan antara lain :

- a. Integritas dan nilai-nilai etika (*Integrity and ethical values*)

Integritas atau kejujuran dan nilai-nilai etika merupakan dasar pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen dalam mengurangi dan meredam tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh individu dalam perusahaan.

b. Komitmen terhadap kompetensi (*Commitment to competence*)

Pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tiap individu dan merupakan pertimbangan manajemen tentang tingkat kompeten untuk pekerja tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diubah menjadi keahlian dalam pengetahuan yang dibutuhkan.

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit (*Board of directors or audit committee participation*)

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangannya, dan kepatuhannya terhadap hukum, peraturan, dan standar yang terkait. Komite tersebut bekerja dekat dengan auditor eksternal dan internal perusahaan.

d. Struktur organisasi (*Organization structure*)

Struktur organisasional perusahaan menetapkan garis otoritas dan tanggung jawab serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian operasinya.

e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab (*Assignment of authority and responsibility*)

Wewenang dan tanggung jawab dapat diberikan melalui deskripsi pekerjaan secara formal, pelatihan pegawai, dan rencana

operasional, jadwal dan anggaran. Salah satu hal yang sangat penting adalah peraturan yang menangani masalah seperti standar etika berperilaku, praktek bisnis yang dapat dibenarkan, peraturan persyaratan, dan konflik kepentingan.

f. Kebijakan sumber daya manusia dan praktiknya (*Human resource policies and practices*)

Kebijakan dan praktik-praktik mengenai pengontrakan, pelatihan, pengevaluasian, pemberian kompensasi, dan promosi pegawai mempengaruhi kemampuan organisasi untuk meminimalkan ancaman, resiko dan pajanan. Para pegawai harus dipekerjakan dan dipromosikan berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi persyaratan pekerjaan mereka.

2. Penafsiran Risiko (Risk Assesment)

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengelola, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko-risiko dapat timbul dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Perubahan dalam lingkungan operasi

Perubahan peraturan atau lingkungan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan.

b. Personel baru

Personel atau karyawan baru mungkin memiliki pandangan yang lain atas pengendalian intern yang sedang diterapkan dalam perusahaan.

c. Sistem informasi baru

Perubahan dalam sistem informasi dapat merubah risiko yang berubah dengan pengendalian intern.

d. Teknologi baru

Teknologi yang diterapkan pada proses produksi atau sistem informasi dapat merubah risiko yang sebelumnya telah diperkirakan oleh pengendalian intern.

e. Lingkungan, produk, atau kegiatan baru

Bidang usaha atau transaksi yang dikenal secara samar oleh perusahaan akan menimbulkan risiko baru yang sebelumnya telah diperkirakan oleh pengendalian intern.

f. Reskrukturasi korporasi/perusahaan

Penyusunan kembali dalam tubuh perusahaan dapat disertai dengan pengurangan staf dan perubahan dalam pemisahan tugas yang bisa merubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian intern.

g. Operasi luar negeri

Perluasan daerah usaha tentu menimbulkan risiko yang dapat menimbulkan dampak terhadap pengendalian intern.

#### h. Standar akuntansi baru

Penerapan atau perubahan prinsip-prinsip akuntansi dapat menimbulkan risiko dalam mempersiapkan laporan keuangan.

### 3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Pada umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan prosedur yang meliputi:

#### a. Tinjauan terhadap kinerja

Aktivitas pengendalian intern dilaksanakan dengan mengadakan tinjauan terhadap kinerja, yaitu dengan cara membandingkan antara pelaksanaan kerja sebenarnya dengan anggaran, peramalan dan priode tinjauan kerja sebelumnya, serta analisis yang telah dilaksanakan dan tindakan koreksi yang telah dilaksanakan.

#### b. Pengelolaan informasi

Berbagai tindakan pengendalian dilaksanakan dengan memeriksa tingkat keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Aktivitas pengendalian sistem informasi terdiri atas:

##### 1) Pengendalian umum

Pada umumnya pengendalian terhadap operasi pusat data akuisisi dan pemeliharaan sistem *software*, akses keamanan, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi.

## 2) Pengendalian aplikasi

Dilakukan terhadap pengelolaan aplikasi individu. Pengendalian ini menjamin bahwa transaksi yang dilaksanakan telah sah, telah di otorisasi dengan benar, dan telah diolah secara akurat dan lengkap.

### c. Pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian ini dilaksanakan terhadap fisik atas aktiva, untuk menjaga aktiva dari perbedaan perhitungan antara catatan dengan hasil perhitungan fisik, menghindari pencurian aktiva. Aktivitas ini mendukung persiapan pelaporan keuangan, dan pelaksanaan audit.

### d. Pemisahaan tugas

Tujuan utama pemisahaan tugas adalah untuk menghindari timbulnya kesalahan yang di sengaja atau tidak dalam pengotorisasian transaksi, pencatatan transaksi, dan pemeliharaan aset.

## 4. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengelolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan.

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

## 5. Pemantauan

Pemantauan merupakan tindak lanjut yang digunakan sebagai tambahan terhadap keempat unsur lainnya yang dibuat untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu telah tercapai. Pemantauan berkenaan dengan penilaian keektivan yang terus-menerus pada desain dan operasi pengendalian intern sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan.

## 3. Piutang

### a. Pengertian Piutang

Dalam buku yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan untuk SMK (Muawanah dan Poernawati, 2008:53) mendefenisikan piutang sebagai berikut:

“Piutang adalah jumlah klaim atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang. Tagihan ini bisa dilakukan terhadap individu, perusahaan atau organisasi lainnya.”

Menurut Hery (2009: 265) dalam bukunya Akuntansi Keuangan

Menengah I menjelaskan istilah dari piutang sebagai berikut:

“Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel), memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel, dan piutang bunga), maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain (untuk piutang pajak).”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan tagihan kepada perseorangan, badan usaha atau suatu lembaga organisasi yang belum dibayar karena belum jatuh tempo yang disepakati dengan jangka waktu kurang atau lebih dari satu tahun.

### **b. Klasifikasi Piutang**

Dalam buku yang berjudul *Bijak Mengelolah Piutang Smart In Account Receivable*, pembagian piutang dapat dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan terjadinya (Budi, 2011), yaitu sebagai berikut:

#### 1) Piutang dagang

Piutang yang timbul dari penjualan secara kredit barang dagangan, barang hasil produksi atau jasa yang dihasilkan.

#### 2) Piutang nondagang

Piutang yang timbul dari transaksi yang tidak secara langsung berhubungan dengan penjualan kredit, misalkan piutang kepada karyawan, piutang pendapatan bunga atau piutang kepada pemegang saham.

### **4. Sistem Pengendalian Piutang**

Menurut Hery (2009), kalau kita berbicara mengenai pengendalian internal atas piutang usaha, maka sesungguhnya yang menjadi pusat perhatian kita adalah bagaimana pengamanan yang efisien dan efektif dilakukan atas piutang usaha, baik dari segi pengamanan atas perolehan fisik kas, pemisahan tugas (termasuk masalah otorisasi persetujuan kredit), sampai pada tersedianya data catatan akuntansi yang akurat.

Menurut Heckert et al., yang diterjemahkan oleh Tjendera (2003), ada tiga bidang pengendalian yang umum pada titik mana dapat diambil tindakan untuk mewujudkan pengendalian piutang. Ketiga bidang tersebut adalah:

#### **a. Pemberian Kredit**

Kebijakan kredit dan syarat penjualan harus tidak menghalangi penjualan kepada para pelanggan yang sehat keadaan keuangannya,

dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya piutang sanksi yang berlebihan.

**b. Penagihan (*collections*)**

Apabila telah diberikan kredit, harus dilakukan setiap usaha untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat penjualan dalam waktu yang wajar.

**c. Penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak**

Meskipun prosedur pemberian kredit dan penagihan telah diadministrasikan dengan baik atau dilakukan secara wajar, ini tidak menjamin adanya pengendalian piutang. Yaitu tidak menjamin atau dapat memastikan, bahwa semua penyerahan memang difaktur, atau di faktur sebagaimana mestinya, kepada para pelanggan dan bahwa penerimaan benar-benar masuk kedalam rekening bank perusahaan. Harus diberlakukan suatu sistem pengendalian intern yang memadai.

**5. Piutang Tak Tertagih**

Piutang merupakan salah satu harta pada perusahaan ataupun individu. Itu biasanya di dapat dari penjualan barang atau jasa ataupun dari peminjaman uang.

Penjualan kredit kepada berbagai pelanggan dapat meningkatkan pendapatan dan laba, atautkah memberikan pinjaman uang kepada kelompok atau seseorang (pelanggan) dengan tujuan usaha juga akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Namun ketika ada pelanggan tidak sanggup membayar, dan hal tersebut menimbulkan beban. Beban ini biasanya disebut beban piutang tak tertagih.

Menurut Stice (2009:417), yang diterjemahkan oleh Setya, “piutang tak tertagih yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih karena penjualan secara kredit, yang merupakan kerugian bagi kreditur”.

Sedangkan menurut Hery (2009:269), “jika perusahaan tidak mampu menagih piutang dari pelanggan sehingga menciptakan beban, maka disebut dengan beban piutang tak tertagih”.

Maka peneliti menyatakan bahwa piutang tak tertagih adalah klaim kepada pihak tertentu baik individu maupun organisasi atas uang, barang, atau jasa yang tidak dapat tertagih. Piutang yang telah ditetapkan sebagai piutang tak tertagih bukan merupakan akiva lagi, oleh karena itu harus dikeluarkan dari pos piutang dalam neraca.

Menurut Kieso et al., (2008), dalam pencatatan piutang tak tertagih ada dua metode akuntansi untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih yaitu metode penyisihan dan metode penghapusan langsung. Metode penyisihan (*Allowance Method*), menggunakan penyisihan atau cadangan (*allowance*) dalam mencatat kerugian yang timbul akibat adanya piutang tak tertagih. Dalam hal ini pihak manajemen tidak menunggu sampai suatu piutang benar-benar tidak dapat ditagih, melainkan membuat suatu perkiraan jumlah kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih. Metode penghapusan langsung (*Direct Write Off Method*), merupakan metode yang digunakan untuk mencatat kerugian akibat adanya piutang tak tertagih. Dalam metode ini, perusahaan tidak melakukan pencatatan ataupun selama suatu piutang belum ditentukan sebagai piutang tak tertagih dan akan dihapuskan.

## **6. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri**

Seperti dalam peneliti sebelumnya (Widanarto dan Sudibia, 2016), program SPP yang merupakan penjabaran dari PPK adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok simpan pinjam kaum perempuan. Kelompok SPP adalah kelompok ibu-ibu atau perempuan yang melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. Adapun tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan social dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja (Depdagri RI, 2008). Menurut Subagyo seperti dalam jurnal Widanarto dan Sudibia (2016), program SPP merupakan suatu program pengentasan kemiskinan, dengan kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, agar program tersebut berjalan efektif.

### **B. Tinjauan Empiris**

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Widiasmara tahun 2014 yang berjudul *Analisis Pengendalian intern Piutang Usaha untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Cabang Madiun*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan

*pengendalian internal piutang usaha untuk meminimalkan piutang tak tertagih (bad debt).*

Penelitian yang dilakukan oleh Afifah et al., mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Narotama Surabaya pada tahun 2015. Adapun judul penelitian yaitu Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang pada PT GIS, yang bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem pengendalian internal atas piutang pada PT GIS sudah sesuai atau tidak dengan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik).

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Dewi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya pada tahun 2017 dengan judul *Analisis Pengendalian Piutang untuk Meningkatkan Efektivitas Penagihan Piutang pada PT. Garam (Persero) Surabaya*. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana PT. Garam (Persero) melakukan Pengendalian Internal Piutang Dalam meningkatkan Efektivitas penagihan piutang.

Pada tahun 2017 sebuah tesis mengenai pengendalian piutang oleh Ju seorang mahasiswa Akademi Akuntansi Permata Harapan Batam, dengan judul *Analisis Pengendalian Intern atas Piutang dalam Meminimalkan Resiko Piutang Tak Tertagih pada PT. Global Asia Seluler*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern atas piutang pada PT. Global Asia Seluler dalam menentukan calon debitur agar jumlah piutang tak tertagihnya dapat diminimalkan sekecil mungkin dan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan sistem pengendalian intern atas piutang dalam meminimalkan jumlah piutang tak tertagih dengan menggunakan skedule aging atas penjualan yang telah dicapai PT.Global Asia Seluler.

Adapun peneliti dari mahasiswa Komputerisasi Akuntansi STEKOM Semarang yaitu Siswanto dan Miftahurrohman pada tahun 2017 yang berjudul sistem informasi pengendalian intern atas piutang untuk Meminimalkan jumlah piutang tak tertagih pada ksu makmur Mandiri menggunakan metode umur piutang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamankan dan mengendalikan piutang dari terjadinya tunggakan

Sementara penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah bagaimana sistem pengendalian piutang pada PNPM-MPd di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Penelitian akan melihat lebih detail bagaimana tata kelola yang dilakukan oleh Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dalam hal pengendalian piutang yang telah mereka terapkan dalam sistem pengendalian piutang

**Table 2.1**  
**Indikator Perbedaan**

Nama	Indikator	
	Judul	Tujuan
<b>Widiaswara (2014)</b>	Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih ( <i>Bad Debt</i> ) pada Pt.Wahana Ottomitra Multiartha, tbk Cabang Madiun	Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengendalian Intern Piutang Usaha untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih ( <i>Bad Debt</i> ) pada Pt. Wahana Ottomitra Multiartha,

<p><b>Afifah et al., (2015)</b></p>	<p>Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang pada PT GIS</p>	<p>untuk mengetahui implementasi sistem pengendalian internal atas piutang pada PT GIS sudah sesuai atau tidak dengan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik)</p>
<p><b>Dewi (2017)</b></p>	<p>Analisis Pengendalian Piutang untuk Meningkatkan Efektivitas Penagihan Piutang pada PT. Garam Surabaya</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana PT. Garam melakukan pengendalian internal piutang dalam meningkatkan efektivitas penagihan piutang</p>
<p><b>Ju (2017)</b></p>	<p><i>Analisis Pengendalian intern atas Piutang dalam Meminimalkan Resiko Piutang Tak Tertagih pada PT. Global Asia Seluler.</i></p>	<p>Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian piutang, dan mengetahui pengaruh dari penerapan sistem pengendalian piutang dalam meminimalkan jumlah piutang tak tertagih</p>

<p><b>Siswanto, dan Miftahurrohma (2017)</b></p>	<p><i>Sistem Informasi Pengendalian Intern Atas Piutang Untuk Meminimalkan Jumlah Piutang Tak Tertagih Pada Ksu Makmur Mandiri Menggunakan Metode Umur Piutang</i></p>	<p>Untuk mengamankan dan mengendalikan piutang dari terjadinya tunggakan</p>
--	--	--

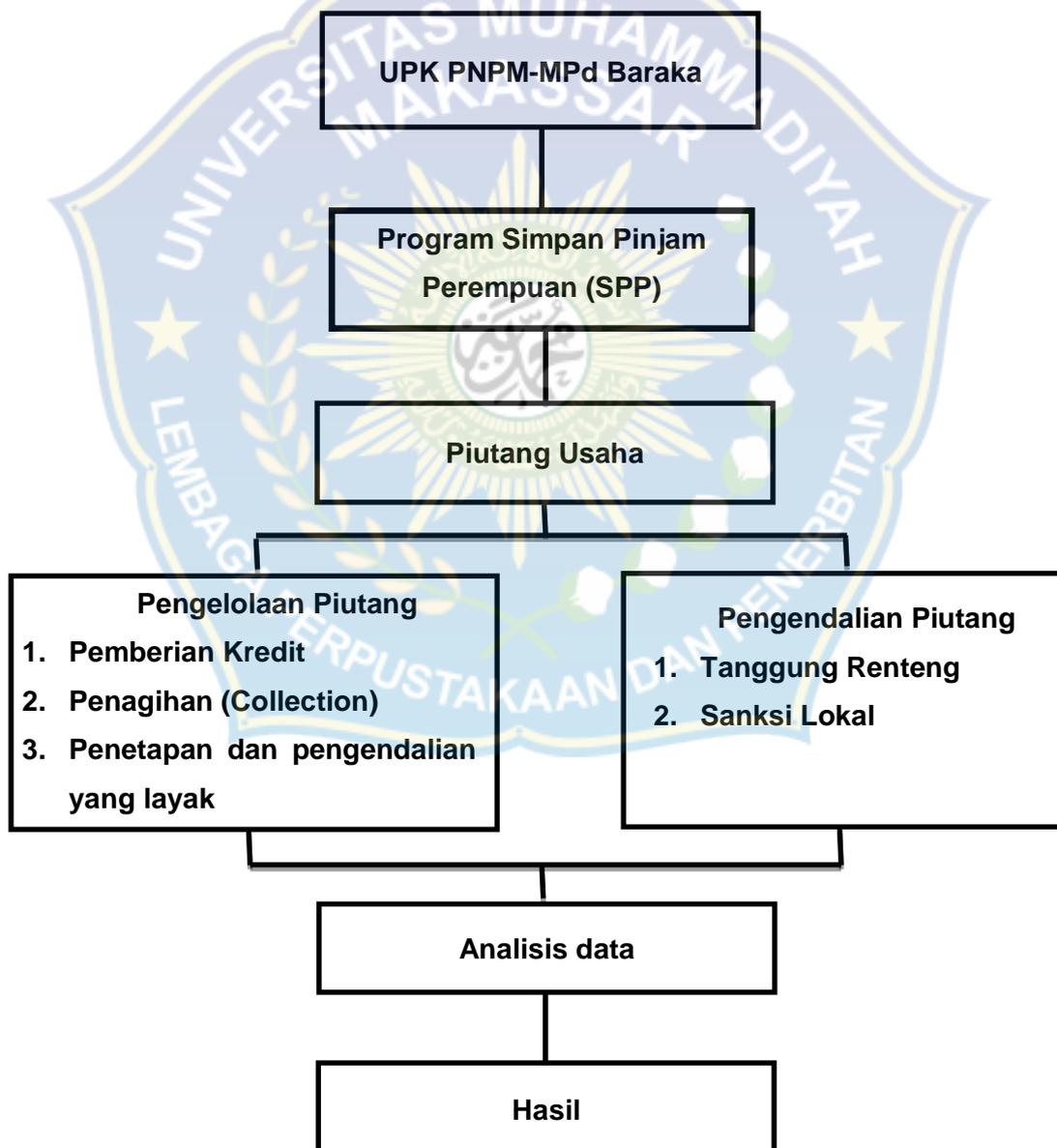
### C. Kerangka Konsep

UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah Unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, yang mana UPK merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari PNPM Mandiri Perdesaan karena UPK sendiri terbentuk oleh adanya Program PNPM-MP. UPK SPP atau Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan, merupakan unit pengelola dana bergulir dari pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan jasa simpan pinjam kepada masyarakat sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari PNPM Mandiri tersebut. Unit Pengolah Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Baraka memiliki misi mensejahterakan masyarakat dengan berbagai programnya. Salah satu programnya dalam hal ini adalah Simpan Pinjam Perempuan yang memberikan pinjaman terhadap kelompok SPP. Dalam pelaksanaan program SPP ini

otomatis akan menimbulkan piutang. Piutang yang merupakan aset perusahaan perlu pengelolaan dan pengendalian piutang yaitu dimulai dari pemberian kredit, penagihan, sampai pada penetapan dan pengendalian yang layak. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menggambarkan kerangka konsep yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Konsep**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis atau tidak ada hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa yang ada sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mengetahui dan menggambarkan bagaimana keadaan dilapangan pada saat penelitian mengenai pengendalian piutang pada Unit Pengelola (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Baraka Kabupaten Enrekang.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan yaitu dimulai pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setelah mendapat surat izin penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di kecamatan Baraka kabupaten Enrekang.

#### **C. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Adapun informan yang dimaksud yaitu:

- a) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
- b) UPK PNPM MPd Baraka.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder atau data pendukung yang bersifat memperkuat hasil analisis. Data ini merupakan data yang sudah ada atau disusun oleh pihak perusahaan, berupa sejarah perkembangan perusahaan, deskripsi jabatan dan struktur organisasi.

### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus UPK PNPM Mandiri pedesaan di kecamatan Baraka yang berjumlah 15 orang serta masyarakat yang tergabung dalam kelompok SPP UPK PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Baraka.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 3 pengurus UPK dan 7 orang yang tergabung dalam 48 kelompok SPP. Adapun 3 orang pengurus UPK yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sedangkan 7 orang dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok SPP adalah kelompok yang tingkat kolektibilitasnya masuk kategori lancar, kelompok yang sudah menerima pinjaman dalam jangka waktu 3-4 tahun terakhir. kelompok yang baru bergabung paling lama 1 tahun dan kelompok yang bersedia untuk diwawancarai.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan studi kasus pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan Baraka, penulis melakukan penelitian sebagai berikut

### **1. Penelitian Lapangan**

Melakukan penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

#### **a. Wawancara**

Dalam hal ini penulis melakukan dialog secara langsung dengan subjek dari UPK (ketua, sekretaris dan bendahara) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) agar penulis dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian.

Jenis wawancara yang akan dipergunakan peneliti adalah wawancara tak terstruktur. Adapun pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

#### **b. Dokumentasi**

Melalui tahap ini penulis akan mengumpulkan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan misalnya berupa data kelompok SPP terbaru, sejarah perkembangan perusahaan, deskripsi jabatan dan struktur organisasi.

### **2. Penelitian kepustakaan**

Cara mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti peneliti, ini

digunakan sebagai bahan panduan untuk melakukan penelitian di lapangan, sebagai pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pembahasan masalah dan sebagai dasar perbandingan praktek di lapangan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan oleh peneliti adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis.

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

1. *Collections* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. *Reduction* data atau pengurangan data merupakan analisa data dengan cara menggolongkan, menajamkan, memilih data mana yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan.
3. *Display* data atau penyajian data ialah data yang sudah direduksi tersebut disajikan dalam bentuk laporan.
4. *Verification* atau penarikan kesimpulan, dimana setelah data semuanya di peroleh kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-MPd) yang berada di kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah Unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. UPK sudah berdiri sejak tahun 2007 seiring dengan diluncurkan Program Nasional yaitu PNPM-Mandiri, ada pun tugas UPK adalah sebagai pengurus untuk mengelola sejumlah dana yang dihibahkan pemerintah melalui PNPM-Mandiri untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat. yang mana UPK merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari PNPM Mandiri Perdesaan karena UPK sendiri terbentuk oleh adanya Program PNPM-MPd.

PNPM-MPd merupakan salah satu upaya untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja di Perdesaan, dengan mendorong kemandirian kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan (Rahayu, 2012). PNPM-MPd mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI Ke-5 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah (Laksono, 2013).

Jenis kegiatan PNPM-MPd antara lain berupa pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana dasar bagi rumah tangga miskin, pelayanan

kesehatan dan pendidikan, peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi dengan produksi berbasis sumber daya lokal dan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Melalui PNPM-MPd diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahap pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian yang berkelanjutan (Rahayu, 2012).

Pada tahun 2007 sebagai kelanjutan dari PPK, pemerintah mengucurkan dana dikaitkan dengan rehab bantuan gempa. Pengalokasian dana dari pemerintah tersebut mengikuti Panduan Teknis Operasional (PTO) th 2006. Panduan Teknis Operasional SPP UPK mengatur bahwa dana yang turun 75% dialokasikan untuk prasarana seperti (bangunan fisik: perbaikan jalan umum, gedung TK, pasar desa, gedung pertemuan desa sedangkan 25% dialokasikan untuk UPK SPP. Pada akhir tahun 2015 melalui aturan Depdagri 2006 menyatakan bahwa PNPM berakhir. Meski PNPM dari pemerintah berakhir, namun aktifitas UPK SPP diizinkan untuk terus berjalan melanjutkan dana bergulir.

Berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Visi dan Misi UPK adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya kelembagaan yang profesional dan mampu mengantarkan masyarakat untuk meraih kesejahteraan serta kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat.

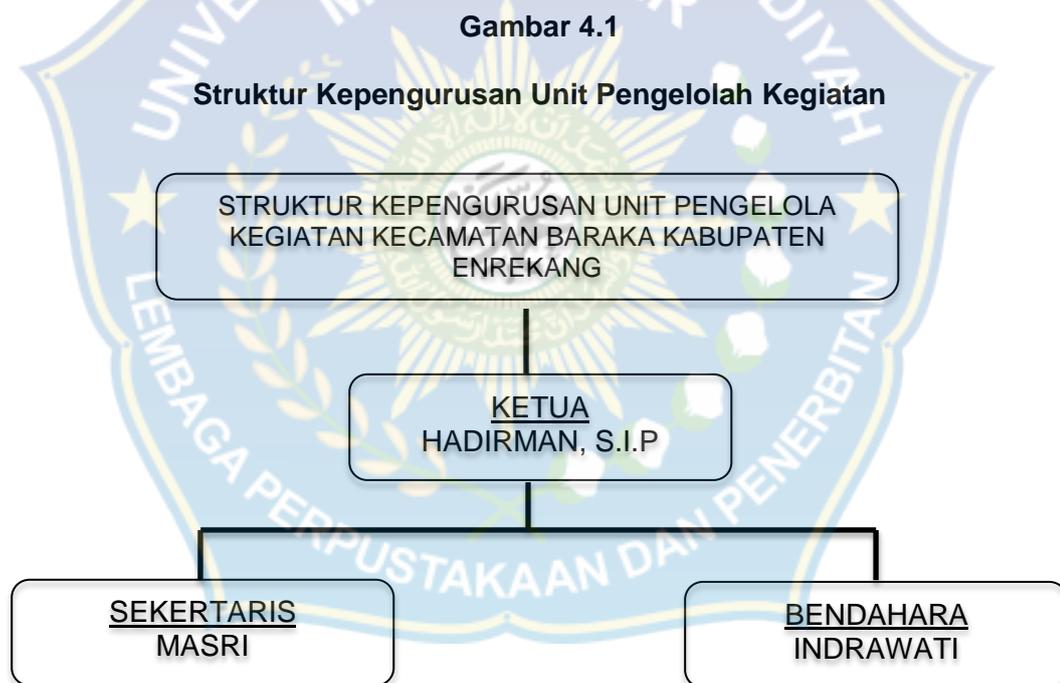
Misi :

- 1) Pelestarian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan
- 2) Penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana bergulir guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dalam

kelompok-kelompok usaha, khususnya yang berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM).

- 3) Peningkatan kapasitas kelompok simpan pinjam dan memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dalam sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat
- 4) Pengembangan jaringan kemitraan untuk mengembangkan usaha kelompok

Adapun struktur kepengurusan UPK di Kec. Baraka Kab. Enrekang adalah sebagai berikut :



## B. Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan hasil penelitian yang didapatkan peneliti dari pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

(PNPM-MPd) kecamatan Baraka kabupaten Enrekang. Peneliti akan mengelompokkan data tersebut sebaga berikut:

#### 1. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh UPK adalah sebagai berikut:

##### a. Membentuk kelompok

Hal pertama yang dilakukan calon peminjam yaitu membentuk kelompok. Dalam sebuah kelompok minimal 3 orang dan maksimal 20 orang yang berdomisili di satu desa yang sama dibuktikan dengan foto kopi KTP dan wajib mendapat persetujuan dari salah satu anggota keluarganya. serta memiliki aturan kelompok sendiri.

##### b. Mengajukan proposal

Setelah membentuk kelompok, tahap selanjutnya yaitu mengajukan proposal. Adapun syarat proposal yang akan diajukan ke UPK berisi:

- Surat permohonan kredit,
- Profil kelompok,
- Daftar anggota kelompok,
- Rencana kegiatan,
- Rencana setoran dari kelompok ke UPK,
- Surat perjanjian bersama tanggung renteng,
- Daftar calon pemanfaat,
- Surat pernyataan persetujuan dari anggota keluarga/penanggung jawab anggota,

- Foto kopi KTP anggota kelompok ,
- Foto kopi KTP dari anggota keluarga/penanggung jawab anggota.

c. Verifikasi

Verifikasi yang dilakukan oleh UPK melalui 2 tahap, yaitu verifikasi atas proposal dan verifikasi kelompok SPP:

- Verifikasi atas proposal.

Dalam tahap ini, proposal yang diajukan oleh calon peminjam akan di verifikasi oleh tim verifikasi UPK yang bertujuan untuk mengetahui apakah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK.

- Verifikasi kelompok SPP

Setelah proposal dinyatakan layak mendapat pinjaman, sebelumnya diadakan pertemuan antara UPK dan seluruh anggota dalam kelompok SPP tersebut. Disini akan menegaskan dan membahas kembali tata cara, rencana pencairan, aturan-aturan antara UPK dan Kelompok SPP termasuk tanggung renteng, dan masalah bunga.

Bunga yang akan dikembalikan ke UPK 1,1% dari total pinjaman, tetapi kelompok SPP bisa menerapkan bunga yang lebih dari itu untuk biaya operasional kelompok. Semisal anggota menerapkan 1,3%, artinya bunga ke UPK tetap 1,1% dan sisanya sebesar 0,3% menjadi kas kelompok yang akan digunakan sebagai biaya operasional kelompok dan lain-lain tergantung dari kesepakatan anggota dalam kelompok tersebut.

d. Pencairan

Setelah verifikasi barulah akan dibuat jadwal pencairan dana bergulir tersebut ke kelompok yang diketahui oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Pencairan dana pinjaman kepada kelompok SPP bisa langsung dilakukan sesuai rapat verifikasi, atau setelah semuanya sudah menyepakati aturan-aturan yang akan berlaku.

2. Penagihan (*Collection*)

Prosedur penagihan yang diterapkan oleh UPK merupakan penagihan tanggung renteng. Sebelum hutang oleh kelompok SPP jatuh tempo, para anggota atau yang menggunakan pinjaman dari UPK mengumpulkan angsurannya terlebih dahulu kepada bendahara kelompok. Jika semua anggota telah menyetor ke bendahara kelompok, selanjutnya bendahara yang akan menyetor ke kantor UPK.

Piutang yang diberikan oleh UPK merupakan dana bergulir atas dasar kepercayaan. Artinya, pinjaman atau pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan yang rentan terhadap penyelewengan. Maka dari itu bentuk penanganan yang dilakukan oleh UPK untuk menghindari hal tersebut dan terhadap kelompok yang menunggak yaitu memberikan teguran baik secara langsung maupun via telpon, jika tidak bisa dengan cara tersebut UPK akan mengadakan pertemuan terhadap kelompok tersebut dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Jangka waktu pengembalian pinjaman yakni 12 bulan s/d 18 bulan diangsur setiap bulan dan perempat bulan dengan ketetapan bunga sebesar 1,1%.

### 3. Penetapan dan pengendalian yang layak

Program kelompok SPP yang dikelola oleh UPK merupakan program pemberdayaan masyarakat, yang menandakan program saling membantu antara pihak kelompok SPP dan pihak UPK. Sistem pengendalian piutang yang diterapkan berupa kesepakatan antara pihak kelompok SPP dengan pihak UPK yang disebut sistem Tanggung Renteng. Jika dalam satu kelompok ada anggota yang pada saat jatuh tempo kredit tidak mampu menyetor/melunasi hutangnya, maka seluruh anggota dalam kelompok tersebut akan menanggung anggota yang tidak mampu dengan persyaratan di lain waktu anggota tersebut akan melunasi kembali ke kelompok sesuai dengan tunggakanya.

Salah satu tindakan pengendalian yang dilakukan oleh UPK yaitu verifikasi yang di perketat. Seperti yang di jelaskan sebelumnya, verifikasi melalui 2 tahap yaitu verifikasi proposal dan verifikasi kelompok. Selain dari itu, tindakan lainnya yaitu diadakan pembinaan oleh tim Badan Kerja Sama Desa (BKAD).

Adapun sanksi yang diberlakukan dalam program SPP ini yaitu sanksi lokal, diumumkan dimuka umum (didesa tempat kelompok SPP) dan berimbas terhadap kelompok lain di desa tersebut yakni tidak di ikut sertakan desa tersebut dalam program UPK. Sanksi ini akan mendorong peminjam untuk cepat melunasi utangnya melalui dorongan dari kelompok lain dan masyarakat di desa tersebut. Selama ada salah satu kelompok di satu desa yang tidak melunasi utangnya maka akan berimbas kepada kelompok lain, kelompok di desa tersebut tidak bisa mengajukan dan mendapat pinjaman lagi dari UPK.

Selain dari sanksi bila angsuran menunggak, ada juga bentuk penghargaan yaitu berupa Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW). IPTW sebesar 0,1% dari total pengembalian pinjaman akan diberikan kepada kelompok SPP yang angsurannya lancar.

Berikut beberapa kiat yang diterapkan oleh UPK untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya tunggakan kelompok diantaranya:

- a. Pengalokasian dana SPP ke kelompok di kondisikan dengan kemampuan kelompok sesuai hasil identifikasi tim verifikasi dan UPK.
- b. Sistem penyaluran dibawah tanggal 10. Sehingga jika ada kelompok yang terlambat memasukkan angsurannya, maka UPK mempunyai cukup waktu untuk melakukan pembinaan kelompok dan penagihan.
- c. Memaksimalkan kinerja tim verifikasi SPP dalam hal ini dimulai dari pemeriksaan proposal, kelayakan proposal sampai pada penanganan masalah bila terjadi.
- d. Kerjasama yang baik dengan aparat pemerintah kecamatan dan desa dalam pendampingan dan pembinaan kelompok SPP.
- e. Pembinaan kelompok secara rutin dalam hal pembangunan usaha kelompok dan administrasi kelompok.
- f. Memberikan sanksi kepada kelompok bila terjadi tunggakan dan keterlambatan dalam membayar angsurannya. Adapun sanksi bila terjadinya tunggakan adalah tidak mengikut sertakan desa tersebut dalam program UPK.
- g. Bila di inidikasi ada kelompok yang akan menunggak, secepatnya di tindak lanjuti untuk mencari solusi terbaik dalam haal ini UPK

berkoordinasi pengurus kelompok dan pelaku BKAD UPK selanjutnya bila tidak terselesaikan akan berjenjang ke Kades.

- h. Memberikan Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) jika angsurannya lancar.

### C. Pembahasan

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam mengelola dana bergulir bergantung pada sistem pengendalian piutangnya, sehingga tujuan dari UPK memberikan piutang kepada kelompok SPP dapat memberikan manfaat kepada lebih banyak anggota atau calon anggota lainnya, dengan demikian program tersebut akan memberikan manfaat yang banyak terhadap masyarakat yang terbantu dalam hal pembiayaan usaha.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Rivai 2010). Adapun jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu berdasarkan tujuan dan jangka waktu piutangnya.

Dikaitkan dengan teori tersebut piutang yang diberikan oleh UPK disebut dengan pembiayaan karena merupakan suatu bentuk pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk dipergunakan dalam suatu usaha, pembiayaan diberikan dengan syarat harus dipergunakan sebaik-baiknya, baik itu untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Jenis pembiayaan oleh UPK menurut tujuannya adalah pembiayaan modal usaha yang dimaksudkan untuk memberikan modal dalam rangka pengembangan usaha, sedangkan menurut jangka waktunya adalah pembiayaan jangka pendek yang dilakukan dengan waktu 1 tahun.

Tujuan pemberian piutang yang dilakukan oleh UPK ini tidak lain adalah untuk mendorong para Ibu-Ibu agar lebih produktif sehingga bisa lebih mandiri dalam membantu perekonomian keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bantuan modal untuk mengembangkan atau menjalankan suatu usaha, hal ini sejalan dengan ajaran Islam untuk saling tolong-menolong.

Kehadiran UPK juga sangat bermanfaat dalam mengurangi angka pengangguran, mengajarkan kemandirian dan kerja sama. Hal demikian dapat terlihat saat wawancara dengan berbagai anggota kelompok SPP, yang menyatakan pembiayaan oleh UPK sangat membantu perekonomian kami, dan mengurangi pengangguran. Ini sejalan dengan tujuan dari pembiayaan yaitu bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan.

### **1. Pengendalian Piutang**

Hasil wawancara peneliti mengenai pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK dengan subjeknya adalah 3 orang pengurus UPK di Kec. Baraka sepakat mengatakan bahwa sistem pengendalian piutang yang diterapkan yaitu sistem tanggung renteng dan sanksi local. Dimana tanggung renteng yaitu piutang yang diberikan secara berkelompok, artinya dengan sistem ini apabila ada salah satu anggota yang tidak mampu membayar angsurannya tepat waktu maka pembayaran akan ditanggung oleh semua anggota yang ada dalam kelompok tersebut dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penunggakan pembayaran kelompok terhadap UPK. Selain itu hasil wawancara dengan 6 subjek dari kelompok SPP

menyatakan bahwa yang diterapkan UPK dalam pengendalian piutang adalah tanggung renteng dengan sanksi lokal.

a. Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng sejalan dengan apa yang telah diatur dalam pasal 1278 KUH Perdata mengenai prosedur perguliran dana program SPP menggunakan sistem tanggung renteng, adapun bunyinya yaitu *“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perkataan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika didalan persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara orang berpiutang.”*

★ Tanggung renteng adalah tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang. Manfaat dari tanggung renteng ini adalah meringankan beban sehingga pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang.

Sebagaimana definisi dari tanggung renteng, semua anggota yang tergabung dalam kelompok saling bertanggung jawab atas setiap keputusan dengan melalui proses musyawarah terlebih dahulu, seperti pengambilan keputusan jumlah pinjaman yang akan diajukan dan penyelesaian masalah tagihan. Pola tanggung renteng ini mengandung nilai tanggung jawab, kedisiplinan, kerja sama, kejujuran, saling keterbukaan, kebersamaan dan kepercayaan, dengan seperangkat nilai-

nilai tersebut maka sistem ini dijadikan sebagai pengaman asset, ketika semua nilai tersebut dapat dijunjung tinggi maka pengamanan assetnya pun akan semakin kuat begitu juga sebaliknya.

Piutang dengan sistem tanggung renteng ini apabila ada anggota yang tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan maka akan ditanggung sementara oleh semua anggota kelompok, sehingga seluruh dari angsuran yang harus disetorkan ke UPK sesuai dengan jumlah tagihan dan tepat waktu, cara ini terbilang efektif dan dapat mengamankan asset dari UPK dan menjamin keberlangsungan mereka.

Piutang oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Baraka sejalan dengan unsur-unsur kredit, sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Dana yang dikucurkan oleh UPK merupakan dana amanah yang digulirkan kepada kelompok SPP dengan ketentuan berlaku dan tanpa jaminan.

2) Kesepakatan

Kesepakatan memberikan pinjaman akan diputuskan oleh UPK setelah rapat verifikasi, kemudian pencairan dana akan dilakukan langsung oleh UPK dengan turun kelapangan dalam rangka penyerahan dana pinjaman kepada kelompok SPP, penyerahan pinjaman kepada ketua kelompok oleh ketua UPK akan disaksikan oleh anggota kelompok beserta pihak UPK sendiri yang kemudian akan didokumentasikan dan dilaporkan pada berita acara. Setiap pembayaran tagihan akan dibuktikan dengan slip pembayaran yang

ditanda tangani oleh penyeter dan penerima oleh pihak UPK yang bertugas.

### 3) Jangka waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu yang pinjaman oleh UPK adalah satu tahun, setelah satu tahun lunas kelompok dapat mengajukan pinjaman kembali dengan memenuhi ketentuan tertentu.

### 4) Risiko

Setiap organisasi atau perusahaan tentunya akan menghadapi berbagai risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuannya, baik risiko yang berasal dari eksternal perusahaan maupun risiko yang berasal dari internal perusahaan. Risiko ini terkait dengan penetapan tujuan-tujuan yang ingin dicapai organisasi, yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan. UPK menghadapi risiko internal yaitu tunggakan kredit pada program SPP masih sering terjadi di UPK PNPM MPd Baraka. Hal ini disebabkan karena adanya faktor gagal usaha, dan gagal panen yang dialami oleh kreditur. Risiko ini menjadi tanggungan UPK, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau kebangkrutannya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diperolehnya. Selain tenggang waktu penyebab besarnya risiko yang harus ditanggung

oleh UPK adalah piutang tanpa jaminan yang artinya piutang tersebut tanpa pagar pengaman.

#### 5) Balas Jasa

Pada UPK pembiayaan diberikan dengan tujuan memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, meskipun demikian setiap pinjaman akan dikenakan biaya administrasi yang disebut dengan jasa pinjaman sebesar 1,1%, misalnya pinjaman pada satu kelompok sebesar Rp. 1.000.000 dengan jasa pinjaman 1,1% maka total pengembalian selama satu tahun adalah Rp. 1.011.000 yang artinya pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 84.250, pembayaran dilakukan tepat waktu, maka Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebesar 0,1% dari total pengembalian akan dikembalikan lagi untuk kas kelompok.

Dari uraian tersebut, tanggung renteng sangat penting peranannya dalam hal meminimalkan piutang tak tertagih di UPK. Hal tersebut dilihat dari mekanisme tanggung renteng, dana angsuran ditanggung oleh kelompok SPP, artinya kerjasama dan tanggung jawab bersama tercermin dalam mekanisme tanggung renteng ini.

#### b. Sanksi Lokal

Sanksi lokal adalah sanksi yang diberikan kepada kelompok yang melakukan tunggakan serta juga penundaan pencairan bagi kelompok lain yang berada dalam satu desa dengan kelompok tersebut, penundaan tersebut berlaku sampai kelompok yang melakukan tunggakan melaksanakan pembayaran angsuran atau jika pengelola UPK melakukan

penghapusan piutang (karena kerugian pada periode akuntansi tertentu), jadi dengan sistem tersebut maka upaya untuk menjamin kelancaran angsuran tidak hanya dilaksanakan oleh pihak pengelola UPK atau pun ketua kelompok saja, melainkan seluruh anggota kelompok SPP yang ada di desa yang bersangkutan serta peranan dari kepala desa untuk memberikan pembinaan pada masyarakatnya yang tergabung dalam kelompok SPP berupa teguran dari kepala desanya.

Dengan adanya sanksi lokal, ini juga sangat berpengaruh penting terhadap meminimalkan piutang tak tertagih. Hal tersebut kita lihat dari mekanisme sistem ini, piutang oleh kelompok SPP bukan cuman kelompok tersebut yang akan menanggungnya, tetapi kelompok yang ada dalam desa tersebut juga ikut berperan dalam penanganan piutang dengan cara berkomunikasi, memberikan masukan, bahkan sampai mendesak kelompok yang angsurannya masih menunggak, sehingga kelompok yang ada di desa tersebut bisa dapat pinjaman lagi ketika dalam suatu desa tersebut tidak ada satu pun kelompok yang angsurannya menunggak.

Dari uraian diatas, tanggung renteng dan sanksi lokal yang merupakan sistem pengendalian piutang oleh UPK ini berpengaruh terhadap meminimalkan piutang tak tertagih pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Perberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Adapun penghargaan terhadap kelompok yang pembayarannya lancar maka akan mendapatkan IPTW, adapun IPTW adalah Insentif Pembayaran Tepat Waktu yaitu 0,1% dari laba keutungan, misalkan

pinjaman selama satu tahun adalah 10.000.000+110.000 jasa pinjaman total pembayaran satu tahun Rp. 10.110.000, jadi IPTW yang didapatkan adalah 0,1% dari total pengembalian yaitu Rp. 10.100, artinya ketika banyak kelompok yang mendapatkan IPTW maka angka pengembaliaanya tinggi.

Selain mendapatkan IPTW kelompok yang pembayaran angsurannya lancar dan tidak bermasalah maka diperbolehkan mendapatkan pinjaman lagi setelah periode pinjaman berakhir yaitu dalam masa 1 tahun dengan jumlah pinjaman lebih besar dari sebelumnya, dalam proses peminjaman kembali meskipun yang bersangkutan dikategorikan lancar dalam pembayaran angsuran sebelumnya tetap harus mengikuti prosedur awal dari tahapan pertama hingga terakhir guna menjamin keberlangsungan dari piutang itu sendiri.

Dari uraian diatas, IPTW ini dapat bermanfaat terhadap pengelolaan piutang sehingga tidak terjadi piutang tak tertagih, karena IPTW merupakan suatu penghargaan sekaligus ajakan terhadap kelompok-kelompok SPP untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu.

Selain itu, setiap anggota kelompok harus dapat memastikan bahwa dana yang nantinya mereka dapatkan benar-benar akan digunakan untuk modal usaha, jadi dana yang diberikan benar-benar dana amanah yang akan dipertanggungjawabkan semua anggota kelompoknya, dengan cara demikianlah diharapkan penyelewengan dana dapat dihindari.

Dari uraian diatas peneliti berkesimpulan bahwa sistem yang telah diterapkan dalam pengendalian piutangnya adalah tanggung renteng dan juga penerapan sanksi lokal. Sistem pengendalian piutang pada UPK sangat

bermanfaat dalam meminimalkan piutang tak tertagih. Selain itu sistem tanggung renteng, dan sanksi lokal yang dilakukan dengan efektif dalam menjamin keberlangsungan piutangnya namun tetap saja tidak lepas dari kerja sama semua pihak, seperti kepala desa, pengurus UPK sendiri, ketua kelompok dan anggota kelompok, dimana setiap anggota harus disiplin dalam memenuhi kewajibannya dan mempergunakan dana yang diberikan oleh UPK dengan sebaik-baiknya, begitu juga dengan ketua kelompok sebagai penerima angsuran dari anggotanya harus benar-benar amanah, dari pihak UPK sendiri harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kerja sama semua pihak ini sangat diperlukan dalam menjamin keberlangsungan piutangnya sehingga dapat terus memberikan manfaat kepada kelompok yang sudah bergabung maupun yang akan bergabung dalam upaya meningkatkan perekonomiannya dan terus dapat membawa dampak positif bagi masyarakat disekitarnya.

## **2. Pengelolaan Piutang**

Adapun pengelolaan dan pengendalian piutang yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu:

### **a. Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian Kredit yang oleh UPK dalam mengelolah dan mengendalikan piutang dilakukan secara efektif dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan. Hal demikian dapat terlihat dari prosedur pemberian kredit yang dimulai dari pembentukan kelompok, pengajuan proposal, verifikasi, dan penyaluran

yang diatur dalam SOP UPK dan telah dilakukan sesuai dengan standar tersebut.

b. Penagihan (Collection)

Adapun mekanisme penagihan yang dilakukan oleh UPK sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Hal tersebut terlihat dari prosedur penagihan atau pengembalian angsuran pinjaman yaitu:

- 1) Pembayaran dilakukan oleh ketua kelompok pada UPK yang diatur dalam SOP dan telah disampaikan kepada seluruh kelompok SPP dalam rapat verifikasi kelompok.
- 2) Teguran atau peringatan, hal demikian dilakukan jika langkah pertama tidak terlaksana. Teguran atau peringatan baik secara langsung ataupun via telpon telah dilakukan oleh pihak UPK.
- 3) Pertemuan UPK dengan kelompok, hal tersebut dilakukan jika peringatan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Pertemuan ini akan membahas dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

c. Penetapan dan Penyelenggaraan Pengendalian yang Layak

Penetapan dan pengendalian yang layak diterapkan oleh UPK sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPK PNPM Mandiri Pedesaan Baraka

Pengelolaan piutang pada UPK sangat bermanfaat dalam meminimalkan piutang tak tertagih. Hal ini dapat terlihat dari prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan dengan efektif, prosedur penagihan

yang efektif, serta adanya penetapan dan penyelenggaraan pengendalian yang layak.

Berdasarkan dari pengelolaan dan pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK PNPM MPd Baraka, peneliti berkesimpulan bahwa sistem pengendalian piutang berperan penting dalam meminimalkan piutang tak tertagih pada kelompok SPP yang dikelola oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang.

Data perkembangan saldo pinjaman selama 3 tahun terakhir pada Unit Pengolah Kegiatan kecamatan Baraka kabupaten Enrekang, berikut ini data perkembangan untuk tahun 2015 s/d 2017.

**Table 4.1**

**Perkembangan saldo pinjaman UPK kec. Baraka kab. Enrekang**

Klasifikasi	Tahun		
	2015	2016	2017
Jumlah Piutang SPP	2.239.203.000	2.060.968.000	2.192.164.000
Kelompok	51	48	48
Rata-rata Piutang	43.905.941	42.936.833	45.670.083

Berdasarkan penyajian data diatas jumlah kelompok pada tahun 2015 adalah 51 kelompok dari 15 desa dengan total saldo pinjaman sebesar Rp. 2.239.203.000,00. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah kelompok menjadi 48 kelompok dari 15 desa dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.060.968.000,00. Pada tahun 2017 jumlah kelompok tetap sama pada tahun sebelumnya tetapi dari total saldo pinjaman telah mengalami peningkatan dengan total saldo pinjaman sebesar Rp.2.192.164.000,00.

Setelah mengetahui perkembangan saldo pinjaman selama tiga tahun terakhir maka selanjutnya peneliti menganalisis kolektibilitas piutang UPK selama 3 tahun terakhir, berdasarkan sumber data yang diperoleh dari UPK.

**Tabel 4.2**

**Data Penggolongan Kolektibilitas Unit Pengelola Kegiatan Kec. Baraka Kab. Enrekang Tahun 2014 s/d 2016**

Angsuran	2015	2016	2017
Kolek I (Lancar)	2.228.123.000	1.979.597.000	2.072.405.000
Kolek II (menunggak 1 s/d 2 kali Angsuran)	11.080.000	21.385.000	65.326.000
Kolek III (menunggak 2 s/d 3 kali Angsuran)	-	59.986.000	54.433.000
Kolek IV (menunggak 4 s/d 5 kali Angsuran)	-	-	-
Kolek V (menunggak diatasi 5 kali Angsuran)	-	-	-
Total	2.239.203.000	2.060.968.000	2.192.164.000

Berdasarkan penyajian data dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk klasifikasi kolektibilitas I pada 2015 ada sebesar Rp.2.228.123.000,00 dari total pinjaman sebesar Rp.2.239.203.000,00, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi Rp.1.979.597.000,00 dari total pinjaman sebesar Rp. 2.060.968.000,00. Sedangkan untuk tahun 2017 kembali mengalami peningkatan hingga Rp.2.072.405.000,00 dari total pinjaman sebesar Rp.2.192.164.000,00. Sedangkan untuk klasifikasi kolektibilitas II mengalami kenaikan setiap

tahunnya, selanjutnya kategori klasifikasi kolektibilitas III pada tahun 2015 berada pada angka 0 kemudian pada tahun tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp.59.986.000,00, sedangkan tahun berikutnya mengalami lagi penurunan. Untuk klasifikasi kolektibilitas IV dan Kolektibilitas V pada tahun 2015 dan 2017 selalu berada pada angka 0.

Dari uraian tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa total pinjaman SPP dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami perubahan yang tidak menentu. Penurunan dan kenaikan juga terlihat pada penyajian kolektabilitas. Artinya angsuran yang masih menunggak mulai dari 2015 sampai dengan 2017 masih sering terjadi dan terus mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan dengan berbagai permasalahan seperti gagal usaha dan gagal panen.

Hal ini dibenarkan oleh Rosida (ketua kelompok SPP Wanita Tani Bahagia): *usaha pertanian (palawija bawang merah) yang kami lakukan tidak selalu berhasil. Kadang kami dipermasalahkan oleh cuaca yang mengakibatkan bawang terkena hama dan kadang mengakibatkan gagal panen.*

Selain dari gagal panen, masih banyak hal yang mengakibatkan angsuran menunggak diantaranya penyelewengan oleh ketua kelompok. Ada ketua kelompok yang tidak melakukan penyetoran angsuran yang sudah dibayar oleh anggotanya.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh UPK salah satunya yakni dengan mendatangi anggota kelompok untuk membuat kesepakatan pelunasan atau angsuran. Seperti yang dikemukakan oleh ketua UPK kecamatan Baraka (Wadirman), langkah yang dilakukan oleh UPK adalah

dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul di kelompok melalui pembinaan-pembinaan administrasi kelompok sehingga bisa mendeteksi permasalahan sejak dini. Ketika permasalahan sudah terjadi maka hal pertama yang dilakukan adalah memberikan surat peringatan dan pemberitahuan tertulis kepada kelompok tentang tunggakan yang masih tersisa. Ketika belum ada respon kemudian dilakukan pendekatan kepada ketua kelompok dan membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, kemudian melakukan konfirmasi kepada kelompok.

Untuk yang menunggak karena usahanya mengalami kegagalan, dilakukan pengecekan apakah memang benar usaha yang dilakoni mengalami kegagalan. Jika benar mengalami kegagalan dilakukan pembinaan lagi, kemudian membahas solusi dari anggurannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian piutang yang diterapkan oleh UPK Kec. Baraka Kabupaten Enrekang adalah tanggung renteng, dan sanksi lokal. Tanggung renteng merupakan perjanjian piutang dimana tanggung jawab terhadap hutangnya ditanggung secara bersama-sama. Semua anggota yang tergabung dalam kelompok saling bertanggung jawab atas setiap keputusan yang akan diambil. Sanksi lokal yaitu diumumkan dimuka umum dan berimbas terhadap kelompok lain di desa tersebut.
2. Dengan adanya sistem pengendalian piutang akan bermanfaat terhadap pengelolaan piutang usaha sehingga piutang tak tertagih dapat diminimalkan. Sistem pengendalian piutang yang baik dapat dilihat dari pemberian kredit, penagihan, penetapan dan penyelenggaraan pengendalian yang layak.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah angsuran menunggak yakni dengan memberikan surat peringatan, kunjungan atau pendekatan secara kekeluargaan dan pelatihan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut :

1. Dalam menjamin keberlangsungan piutangnya disarankan agar selalu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng dan selalu terjalin kerja sama yang baik dari semua pihak, seperti kepala Desa, Pengurus UPK, Ketua kelompok dan anggota kelompok, sehingga dapat terus memberikan manfaat kepada kelompok yang sudah bergabung maupun yang akan bergabung dalam upaya meningkatkan perekonomiannya dan terus dapat membawa dampak positif bagi masyarakat disekitarnya.
2. Dalam melakukan verifikasi dan analisa oleh UPK kepada calon debitur, tim verifikasi harus lebih memperhatikan kondisi calon debitur tersebut apakah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam SOP UPK atau tidak sehingga layak untuk dilakukan pembiayaan serta wajib menjelaskan mengenai paham kredit kepada calon debitur. Diharapkan dengan debitur yang berkualitas, maka jumlah angsuran yang menunggak dan piutang tak tertagih menjadi semakin kecil.
3. UPK lebih meningkatkan pengawasan kredit dan lebih teliti dalam menganalisa usaha atau pekerjaan yang dijalankan oleh debitur agar piutang yang tak tertagih dapat diminimalkan sekecil mungkin, atas kondisi situasional masing-masing debitur.
4. Untuk anggota kelompok yang ingin tergabung dalam kelompok SPP agar menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan kepercayaan karena pengendalian piutang sebenarnya telah dimulai dari pembentukan kelompok. Diharapkan dari hal ini, tidak ada tunggakan karena sifat penyelewangan atau ketidakmampuan salah satu anggota kelompok dalam membayar angsurannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2016. *Auditing, Buku 1, Edisi 4*. Salemba Empat: Jakarta.
- Akmal. 2009. *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit*. Indeks: Jakarta.
- Budi, H.I.S. 2011. *Bijak Mengelola Piutang Smart in Account Receivable*. PT Alex Media Komputindo: Jakarta
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. *Penjelasan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Direktorat Jendral Pemberdayan Masyarakat Dan Desa..
- Hall, J.A. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 4, Buku 1. Salemba Empat: Jakarta.
- Heckert, J.B., Wilson, J.D., dan Campbell, J.B. 2003. *The Commite On Auditing*. Edisi 3, Alih Bahasa oleh Tjintjin Fenix Tjandera. Erlangga: Jakarta.
- Hery. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Bumi Askara: Jakarta
- Keiso, Weygandt, dan Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Kedua Belas. Erlangga: Jakarta.
- Laksono, Agung. 2013. *Menuju Indonesia Emas*. Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat: Jakarta.
- Muawanah, U., dan Poernawati, F. 2008. *Konsep Dasar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. Jilid 2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan: Jakarta
- Muddin, *Peran Kelompok PNPM SPP*. Diambil dari: (<https://bahagiamuddin.wordpress.com/2013/02/09/peran-kelompok-spp-pnpm/>, diakses 22 januari 2019)
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta
- Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rahayu, S.L. 2012. *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan*, Fokus Media: Bandung.
- Rivai, Veithzal, et al, 2010. *Islamic Banking*, PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Stice, J.D., Stice, E.K., Skousen, F. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Edisi Keenambelas, Diterjemahkan oleh Syam Setya. Salemba Empat: Jakarta.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya: Bandung
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Bumi Askara: Yogyakarta

Syukur, A.S. 2009. *Intermediate Accounting*. AV Publisher: Jakarta.

Wahdiah. 2017. *Pengendalian Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Di Kecamatan Astambul*. (<http://www.google.co.id/amp/s/docplayer.info/amp/56964013-oleh-wahdiah-nim.html>], diakses 12 September 2018)

Widanarto, M.V.C., dan Sudibia, K. 2016. Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Pnpm Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol.5 No.2.



**LAMPIRAN 1**

Kolektibilitas pinjaman SPP Unit Pengolah Kegiatan Kecamatan Baraka Kabupaten  
Enrekang Tahun 2015

NO	KELOMPOK SPP	SALDO PINJAMAN	KOLEK I	KOLEK II	KOLEK III	KOLEK IV	KOLEK V
<b>I. KEL. BARAKA</b>							
1	BARAKA I	21.244.000	21.244.000				
2	BIRSAL	41.662.000	41.662.000				
3	BOUGENVILLE	8.747.000	8.747.000				
4	MELATI KAJU COLO'	20.831.000	20.831.000				
5	SRIKANDI	14.581.000	14.581.000				
<b>II. KEL. BALLA</b>							
6	MEKAR SARI II	21.750.000	21.750.000				
7	MEKAR SARI IV	33.830.000	33.830.000				
8	MEKAR SARI I	61.332.000	61.332.000				
9	MELATI	33.328.000	33.328.000				
<b>III. TOMINAWA</b>							
10	FLAMBOYAN	17.000.000	17.000.000				
11	MELATI	44.000.000	44.000.000				
12	PENTUANGINAN III	49.996.000	49.996.000				
13	PENTUANGINAN I	21.998.000	21.998.000				
14	PENTUANGINAN IV	70.000.000	70.000.000				
15	SIPATUO III	41.662.000	41.662.000				
<b>IV. DS. PARINDING</b>							
16	TUNAS MEKAR I	20.206.000	20.206.000				
17	TUNAS MEKAR III	10.000.000	10.000.000				
<b>V. DS. BANTI</b>							
18	SIPAKAMASE I	82.500.000	82.500.000				
19	SIPAKAMASE II	75.000.000	75.000.000				
20	SIPAKAMASE III	41.498.000	41.498.000				
21	SIPAKAMASE IV	14.000.000	14.000.000				
<b>VI. DS. JANGGURARA</b>							
22	BUNGA MENDOE I	36.666.000	36.666.000				
<b>VII. DS. PERANGIAN</b>							
23	BUNGA LOMBOK	100.000.000	100.000.000				
24	BUNTU BULAWAN	69.000.000	69.000.000				
25	KEMBANG MEKAR	85.000.000	85.000.000				
26	LIKU DEWATA	75.000.000	75.000.000				
27	SIPATUJU	100.000.000	100.000.000				
<b>VIII. DS. SALUKANAN</b>							
28	ALHIDAYAH	41.662.000	41.662.000				
29	BUNTU PERAK	12.500.000	12.500.000				
30	DELIMA	76.000.000	76.000.000				
31	MAWAR	18.665.000	18.665.000				
32	MELATI	53.000.000	53.000.000				
<b>IX. DS. TIROWALI</b>							
33	ANUGERAH	24.980.000	24.980.000				
34	KARUNIA I	41.662.000	41.662.000				
35	KARUNIA II	73.333.000	73.333.000				

36	KARUNIA III	82.500.000	82.500.000				
37	KARUNIA IV	58.330.000	58.330.000				
<b>NO</b>	<b>NAMA KELOMPOK SPP</b>	<b>SALDO PINJAMAN</b>	<b>KOLEK I</b>	<b>KOLEK II</b>	<b>KOLEK III</b>	<b>KOLEK IV</b>	<b>KOLEK V</b>
38	SALAK	63.748.000	63.748.000				
<b>X. DS. KADINGEH</b>							
39	SIPATURU'	20.328.000	20.328.000				
<b>XI. DS. PANDUNG BATU</b>							
40	BUNGA BAWANG	94.000.000	94.000.000				
41	USAHA SUKSES	96.000.000	96.000.000				
42	USAHA SUKSES I	38.000.000	38.000.000				
<b>XII. DS. BONTONGAN</b>							
43	BUAH DURIAN	19.158.000	19.158.000				
44	BUAH TOMAT	3.750.000	3.750.000				
45	BUNGA CENGKEH	17.912.000	17.912.000				
46	BUNTU TADEN	61.108.000	61.108.000				
47	WANITA LOPI	44.495.000	44.495.000				
48	WANITA TANI BAHAGIA	61.076.000	49.996.000	11.080.000			
<b>XIII. DS. KENDENAN</b>							
49	BATU ARIRI	21.665.000	21.665.000				
<b>XIV. DS. PEPANDUNGAN</b>							
50	SERUMPUN PADI	4.500.000	4.500.000				
<b>TOTAL</b>		<b>2.239.203.000</b>	<b>2.228.123.000</b>	<b>11.080.000</b>			



**LAMPIRAN 2****Koleabilitas pinjaman SPP Unit Pengelolah Kegiatan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Tahun 2016**

NO	KELOMPOK SPP	SALDO PINJAMAN	KOLEK I	KOLEK II	KOLEK III	KOLEK IV	KOLEK V
<b>I. KEL. BARAKA</b>							
1	BARAKA I	19.997.000	19.997.000				
2	BIRSAL	41.662.000	41.662.000				
3	BOUGENVILLE	9.000.000	9.000.000				
4	MELATI KAJU COLO'	25.000.000	25.000.000				
5	SRIKANDI	18.750.000	18.750.000				
<b>II. KEL. BALLA</b>							
6	MEKAR SARI I	74.998.000	74.998.000				
7	MEKAR SARI II	24.244.000	24.244.000				
8	MEKAR SARI IV	37.915.000	37.915.000				
9	MELATI	33.328.000	33.328.000				
<b>III. TOMINAWA</b>							
10	MELATI	55.000.000	55.000.000				
11	PENTUANGINAN I	47.498.000	47.498.000				
12	PENTUANGINAN III	35.498.000	35.498.000				
13	PENTUANGINAN IV	63.332.000	63.332.000				
14	SERBA GUNA	7.568.000	2.750.000	4.818.000			
15	SIPATUO III	46.664.000	46.664.000				
<b>IV. DS. PARINDING</b>							
16	TUNAS MEKAR I	28.750.000	28.750.000				
17	TUNAS MEKAR II	17.328.000	17.328.000				
<b>V. DS. BANTI</b>							
18	SIPAKAMASE I	77.916.000	77.916.000				
19	SIPAKAMASE II	90.000.000	90.000.000				
20	SIPAKAMASE III	40.000.000	40.000.000				
21	SIPAKAMASE IV	22.664.000	22.664.000				
<b>VI. DS. JANGGURARA</b>							
22	BUNGA MENDOE I	55.000.000	55.000.000				
<b>VII. DS. PERANGIAN</b>							
23	BUNTU BULAWAN	63.000.000	63.000.000				
24	BUNGA LOMBOK	100.000.000	100.000.000				
25	KEMBANG MEKAR	90.000.000	90.000.000				
26	LIKU DEWATA	70.000.000	70.000.000				
27	SIPATUJU	85.000.000	85.000.000				
<b>VIII. DS. SALUKANAN</b>							
28	ALHIDAYAH	22.500.000	22.500.000				
29	DELIMA	85.000.000	85.000.000				
30	MAWAR	30.000.000	30.000.000				
31	MELATI	35.000.000	35.000.000				
32	REZKI PULMAN	12.000.000	12.000.000				
<b>IX. DS. TIROWALI</b>							
33	ANUGERAH	45.831.000	45.831.000				

34	KARUNIA II	29.998.000			29.998.000		
35	KARUNIA III	29.988.000			29.988.000		

NO	NAMA KELOMPOK SPP	SALDO PINJAMAN	KOLEK I	KOLEK II	KOLEK III	KOLEK IV	KOLEK V
<b>X. DS. KADINGEH</b>							
36	SIPATURU'	22.664.000	22.664.000				
<b>XI. DS. PANDUNG BATU</b>							
37	BUNGA BAWANG	102.000.000	102.000.000				
38	KEMBANG KOL	8.000.000	8.000.000				
39	USAHA SUKSES	106.000.000	106.000.000				
<b>XII. DS. BONTONGAN</b>							
40	BUAH DURIAN	37.885.000	37.885.000				
41	BUAH SALAK	35.000.000	35.000.000				
42	BUAH TOMAT	27.000.000	27.000.000				
43	BUAH TADEN	95.000.000	95.000.000				
44	PEKAPA	16.546.000	16.546.000				
45	WANITA TANI BAHAGIA	16.567.000		16.567.000			
<b>XIII. DS. KENDENAN</b>							
46	BATU ARIRI	1.661.000	1.661.000				
<b>XIV. DS. PEPANDUNGAN</b>							
47	SERUMPUN PADI	22.216.000	22.216.000				
<b>TOTAL</b>		<b>2.060.968.000</b>	<b>1.979.597.000</b>	<b>21.385.000</b>	<b>59.986.000</b>		



**LAMPIRAN 3****Kolekibilitas pinjaman SPP Unit Pengolah Kegiatan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Tahun 2017**

NO	KELOMPOK SPP	SALDO PINJAMAN	KOLEK I	KOLEK II	KOLEK III	KOLEK IV	KOLEK V
<b>I. KEL. BARAKA</b>							
1	BARAKA I	26.664.000	26.664.000				
2	BIRSAL	45.831.000	45.831.000				
3	BOUGENVILLE	7.500.000	7.500.000				
4	MELATI KAJU COLO'	32.898.000	27.081.000	5.817.000			
5	SIMPATI	2.500.000	2.500.000				
<b>II. KEL. BALLA</b>							
6	MEKAR SARI I	105.000.000	105.000.000				
7	MEKAR SARI II	30.497.000	30.497.000				
8	MEKAR SARI IV	37.500.000	37.500.000				
9	MELATI	33.328.000	33.328.000				
<b>III. TOMINAWA</b>							
10	MELATI	100.000.000	66.604.000	33.396.000			
11	PENTUANGINAN I	34.996.000	34.996.000				
12	PENTUANGINAN III	39.998.000	39.998.000				
13	PENTUANGINAN IV	86.246.000	86.246.000				
14	SERBA GUNA	4.381.000		4.381.000			
15	SERBA GUNA 2	12.497.000	12.497.000				
16	SIPATUO III	50.000.000	50.000.000				
<b>IV. DS. PARINDING</b>							
17	TUNAS MEKAR I	33.998.000	33.998.000				
<b>V. DS. BANTI</b>							
18	SIPAKAMASE I	82.500.000	82.500.000				
19	SIPAKAMASE II	90.000.000	90.000.000				
20	SIPAKAMASE III	45.000.000	45.000.000				
21	SIPAKAMASE IV	48.066.000	33.332.000	14.734.000			
<b>VI. DS. JANGGURARA</b>							
22	BUNGA MENDOE I	50.000.000	50.000.000				
<b>VII. DS. PERANGIAN</b>							
23	BUNGA LOMBOK	100.000.000	100.000.000				
24	BUNTU BULAWAN	65.000.000	65.000.000				
25	KEMBANG MEKAR	94.000.000	94.000.000				
26	LIKU DEWATA	68.000.000	68.000.000				
27	SIPATUJU	85.000.000	85.000.000				
<b>VIII. DS. SALUKANAN</b>							
28	ALHIDAYAH	22.500.000	22.500.000				
29	DELIMA	97.000.000	97.000.000				
30	MAWAR	41.666.000	41.666.000				
31	MELATI	25.000.000	25.000.000				
32	REZKI PULMAN	3.827.000			3.827.000		
<b>IX. DS. TIROWALI</b>							
33	ANUGERAH	50.000.000	50.000.000				
34	KARUNIA II	6.998.000		6.998.000			

35	KARUNIA III	26.988.000		26.988.000		
----	-------------	------------	--	------------	--	--

NO	NAMA KELOMPOK SPP	SALDO PINJAMAN	KOLEK I	KOLEK II	KOLEK III	KOLEK IV	KOLEK V
<b>X. DS. KADINGEH</b>							
36	SIPATURU'	22.000.000	22.000.000				
37	SIPATURU II	12.496.000	12.496.000				
<b>XI. DS. PANDUNG BATU</b>							
38	BUNGA BAWANG	105.000.000	105.000.000				
39	USAHA SUKSES	122.000.000	122.000.000				
<b>XII. DS. BONTONGAN</b>							
40	BUAH DURIAN	53.000.000	53.000.000				
41	BUAH SALAK	63.332.000	63.332.000				
42	BUAH TOMAT	58.332.000	58.332.000				
43	BUAH TADEN	31.664.000	31.664.000				
44	PEKAPA	2.013.000	2.013.000				
45	WANITA TANI BAHAGIA	16.267.000			16.267.000		
<b>XIII. DS. KENDENAN</b>							
46	BATU ARIRI	13.330.000	13.330.000				
<b>XIV. DS. PEPANDUNGAN</b>							
47	SERUMPUN PADI	7.351.000			7.351.000		
<b>TOTAL</b>		<b>2.192.164.000</b>	<b>2.072.405.000</b>	<b>65.326.000</b>	<b>54.433.000</b>		





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ihdil, lahir di Awo, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang pada tanggal 24 Desember 1996. Sebagai anak ke-4 dari 6 bersaudara. Dari seorang Bapak bernama (Sanuddin) dengan Ibu bernama (Muna).

Pada tahun 2002 saya melangkahkan kaki kebangku sekolah dasar SD Negeri 7 Gandeng dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun itu juga saya melanjutkan sekolah di SLTP Negeri 3 Baraka dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Baraka pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. Pada Tahun itu juga saya melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Dengan mengambil jurusan Akutansi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

